

# Determinant Fraud Prevention On Villages Government (Study on Villages in Sidoarjo Regency)

## Determinan *Fraud* Prevention Atas Pengelolaan Keuangan Desa

### (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Kabupaten Sidoarjo)

Yolanda Oktaviani <sup>1)</sup>, Sarwenda Biduri <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

email : sarwendabiduri@umsida.ac.id

**Abstract** *This study aims to determine the effect of strengthening village apparatus competence on preventing fraud in village financial management, the effect of strengthening the internal control on preventing fraud in village financial management, the effect of strengthening village apparatus competence and strengthening the internal control system on preventing fraud on village financial management with a leadership style as moderator. This research is quantitative research. The population of this study was 322 villages in Sidoarjo Regency. The samples for this study was 86 respondents. The results of this study are as follows: Village Apparatus Competence has no influence on Fraud Prevention in Village Financial Management. Internal Control has an influence on Fraud Prevention in Village Financial Management. Leadership style does not moderate the influence of village apparatus competence on fraud prevention in village financial management. Leadership style moderates the effect of internal control on fraud prevention in village financial management.*

**Keywords** : *fraud prevention, Village Financial Management, village apparatus competence, internal control, leadership style*

**ABSTRAK** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguatan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa, pengaruh penguatan pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa, pengaruh penguatan kompetensi aparatur desa dan penguatan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan penipuan pengelolaan keuangan desa dengan gaya kepemimpinan sebagai moderator. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 322 desa di Kabupaten Sidoarjo. Sampel untuk penelitian ini adalah 86 responden. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Gaya kepemimpinan tidak memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.*

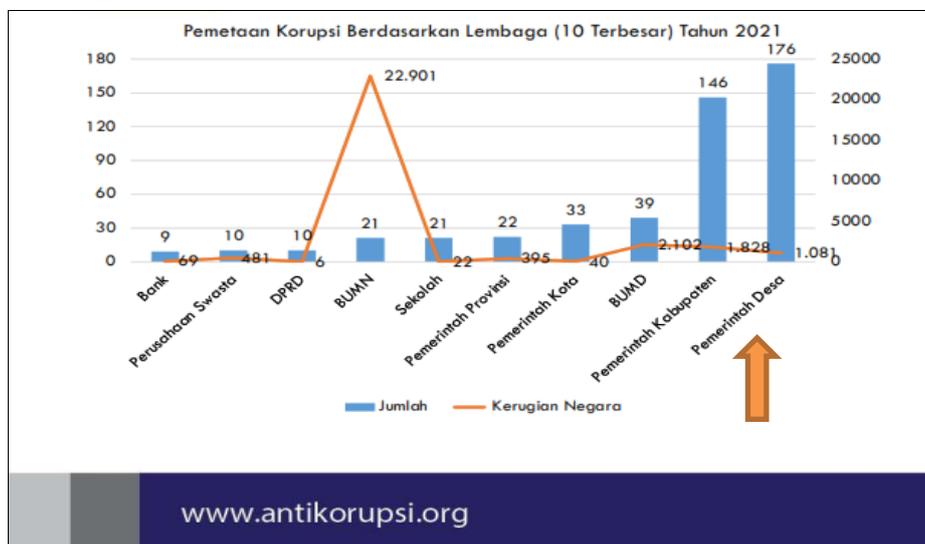
**Keywords** : *determinan fraud prevention, kapasitas Aparatur Desa, pengendalian intern, gaya kepemimpinan*

## I. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2014 sebelum lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi, lahir pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan upaya Pemerintah Pusat dalam memberikan wewenang kepada Pemerintahan terkecil yakni Pemerintah Desa agar dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Serta diharapkan mampu melakukan pemerataan pembangunan sesuai potensi desanya yang mana akan berdampak pula dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai amanat pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa, “Alokasi anggaran Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis Desa secara merata”. Sehingga untuk menyalurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN melalui mekanisme transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dana Desa ada dari tahun 2015 hingga sekarang telah banyak membawa manfaat di desa-desa seperti diungkap pada website Kemendes (diakses tanggal 9 Oktober 2022), bahwa Dana Desa telah digunakan untuk membangun sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa, serta pembangunan di wilayah

pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Namun ibarat uang logam, disisi lain terdapat data mengenai pemetaan kasus korupsi tertinggi di Indonesia yang melibatkan Pemerintah Desa. Berikut ini diambil dari laporan Divisi Pengawasan Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch pada April 2022 tentang hasil pemantauan tren penegakan kasus korupsi tahun 2021 [1].



**Gambar 1** : Grafik Kasus Korupsi Tertinggi Berdasarkan Lembaga yakni Pemerintah Desa  
 Sumber : ICW Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021

Di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 2020 s.d 2022 telah banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi. Sejak Januari hingga Agustus 2022, ada tiga Kades aktif dan satu mantan Kades yang bermasalah hukum di Sidoarjo. Mereka diduga melakukan kesalahan karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Data menunjukkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menagani pengaduan terkait pengelolaan keuangan desa sejumlah 32 aduan (41% dari total pengaduan yang ditangani) pada tahun 2020, 34 aduan (48% dari total pengaduan yang ditangani) pada tahun 2021, dan 36 aduan (58% dari total pengaduan yang ditangani) pada tahun 2022 dengan cut off 1 November 2022.

Dari fenomena tersebut, jelas bahwa pengelolaan keuangan desa masih banyak terjadi korupsi. Penyebab utama korupsi di Pemerintah Desa adalah kurangnya transparansi dan masukan/partisipasi warga dalam proses rencana pembangunan desa [2]. [3] menyatakan bahwa penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan resmi untuk keuntungan pribadi adalah penipuan/fraud di sektor publik. [4] menemukan bahwa perangkat pemerintah desa yang mengelola keuangan desa, sangat rentan terhadap potensi melakukan *fraud* dan oleh karena itu, mereka harus mematuhi beberapa ketentuan. Pertama, masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi keuangan desa; kedua, semua kegiatan yang dibiayai oleh APBDes (baik yang bersumber dari dana transfer meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Pendapatan Desa lainnya) dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, serta hukum; ketiga, masyarakat menerima informasi terbuka tentang kegiatan desa atas pengelolaan keuangan desa; keempat, dalam proses musrenbangdes (penganggaran) maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus menganut prinsip 3E (ekonomis, efektif dan efisien).

Penelitian ini menggunakan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi yang dikaitkan dengan pencegahan fraud yang ada di sektor Pemerintahan Desa. Variabel kompetensi Aparatur dan sistem pengendalian intern mengacu pada penelitian [5] dan [6]. Terdapat satu variabel tambahan yaitu variabel gaya kepemimpinan yang mengacu pada penelitian [7]. Variabel gaya kepemimpinan dalam penelitian ini dijadikan sebagai pemoderasi.

Karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian atas suatu konsep teori. Oleh karena itu yang membuat peneliti merasa pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh penguatan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa? Apakah pengaruh penguatan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa? Apakah pengaruh penguatan kompetensi aparatur desa, penguatan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa dengan gaya kepemimpinan sebagai pemoderasi? Hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna bagi pemerintah tidak hanya dimaksudkan untuk membantu pengurangan dan pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa yang merugikan negara, tetapi juga untuk membantu penulisan penelitian di masa depan sebagai referensi dan menambah pengetahuan tentang variabel dan objek yang sejenis.

## Hubungan Antar Variabel

### A. Pengaruh antara Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa

Penelitian [8] menunjukkan bahwa kecurangan yang terungkap dari hasil yang dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum hanyalah merupakan puncak gunung es dari kecurangan yang benar-benar terjadi. Pasalnya, kerugian finansial yang disebabkan oleh *fraud* tersebut tidak kecil, karena pelaku *fraud* harus merahasiakannya sehingga muncul pengeluaran tak terduga yang mendorong oknum *fraud* untuk mencari keuntungan selanjutnya. Sebaik apa pun rencana anti-*fraud* diterapkan, masalah selalu kembali ke individu yang bertanggung jawab atas sektor keuangan desa karena tidak semua orang jujur dan dapat dipercaya. Mencegah kecurangan yang terjadi pada Pemerintah Desa lebih baik daripada memperbaikinya setelah terjadi. Oleh karena itu, fokusnya harus pada menghindari masalah sejak awal [9]. Keahlian sumber daya manusia, dalam hal ini keahlian Aparatur Pemerintahan Desa, merupakan salah satu variabel yang dianggap dapat menghindari terjadinya kecurangan di Pemerintahan Desa, menurut kajian tersebut. Penelitian [10] menjelaskan bahwa seseorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengendalian diri yang cukup akan lebih peka terhadap *fraud* yang terjadi di sekitarnya, sehingga lebih mudah untuk diidentifikasi. Anggaran seluruh desa yang tertuang dalam APBDes telah mengalokasikan dana setiap tahun untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa beserta perangkat desanya.

Keterkaitan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan kompetensi sumber daya manusia berhubungan dengan teori keagenan. The "nexus of contract" adalah sebuah konsep dari teori keagenan yang mencirikan hubungan kerjasama antara prinsipal atau pihak yang memberikan wewenang dengan agen atau pihak yang menerima sebuah wewenang [11]. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) atas pengelolaan keuangan desa, menurut penelitian [6]. Kesimpulan ini juga dikuatkan oleh penelitian [12] dan [13]. Bahwa sumber daya manusia yang berkualitas/kompeten (dalam hal ini kompetensi perangkat desa) memahami masing-masing tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI), mematuhi norma dan peraturan sosial yang relevan, memahami proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan desa, dan menolak segala bentuk suap pengaruh yang signifikan dalam mencegah kecurangan (*fraud*).

Sementara beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa memang tidak berdampak pada pencegahan *fraud*, studi yang dilakukan oleh [5] dan [14] menemukan hal yang sebaliknya dari teori. Karena mayoritas perangkat desanya memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang disandangnya, sehingga fungsi aparatur tidak banyak berdampak untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

**H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa.**

### B. Pengaruh antara Pengendalian Intern terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern, mendefinisikan bahwa SPI sebagai suatu proses tindakan yang terintegrasi dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko salah saji material atau kehilangan aset. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat membantu mengurangi kejadian perilaku curang dalam pengelolaan keuangan desa, yang mengarah pada laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dan penilaian hukum yang lebih baik. Menurut [10], (COSO) (2019: 7) menerangkan bahwa Pengawasan Pengendalian Internal terdapat lima indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian serta informasi dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk meminimalkan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Sebagai salah satu alat/metode yang digunakan untuk mengawasi, mengelola, dan menilai sumber daya suatu lembaga atau organisasi, sistem pengendalian internal memegang peranan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Sistem pengendalian internal harus memiliki aturan dan proses yang terdefinisi dengan baik yang dapat dipantau dan dideteksi jika terjadi kecurangan untuk memastikan dan memberikan informasi laporan keuangan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan [15]. Penelitian [5], [6], dan [12], menunjukkan perlunya sistem pengendalian internal yang terkendali (efisien) dalam meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*). Diyakini bahwa tujuan Pemerintah Desa telah tercapai berkat kontrol dan pengawasan yang memadai untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menemukan pengendalian internal membantu mengurangi kemungkinan salah urus keuangan yang terjadi di komunitas yang lebih kecil. Namun berdasarkan penelitian [16] dan [14], sistem pengendalian intern tidak terbukti memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

**H2 : pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa.**

### C. Gaya Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh antara Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan

### ***Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa**

Seorang pemimpin yang tidak memiliki ketegasan dalam memimpin suatu organisasi maka akan cenderung tidak dapat mengendalikan *fraud* dalam organisasinya. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah pendekatan yang dia ambil untuk mendapatkan dukungan dari bawahannya serta mengkoordinasikan upaya mereka melakukannya agar mencapai tujuan bersama [17]. Gaya kepemimpinan individu merupakan aspek manajemen yang dapat menginspirasi pengikut [18]. Menurut Robbins & Judge (2008: 83) dalam [19], ada empat tipe gaya kepemimpinan yang berbeda: karismatik (di mana seseorang mempengaruhi stafnya dengan menampilkan kemampuan luar biasa saat memimpin), transaksional (di mana seseorang mendorong stafnya untuk fokus pada tugas yang diberikan), transformasional (di mana seseorang menginspirasi stafnya untuk mengejar kepentingan mereka sendiri untuk mencapai hasil yang luar biasa), dan kreatif (gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan menggambarkan visi masa depan organisasi yang berkembang secara realistis, atraktif dan kredibel). Dalam struktur Pemerintahan Desa telah ditetapkan visi, misi, dan tujuan dalam RPJMDesa, dan penulis penelitian ini menyebut kepemimpinan ini sebagai kepemimpinan transaksional.

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah krusial. Agar efektif, pendekatan seorang pemimpin harus menginspirasi pegawainya untuk melakukan upaya ekstra. Jika seorang pemimpin bertindak tidak rasional, bawahannya akan bisa mengikutinya misal datang terlambat maka memberi efek kepada bawahannya untuk datang terlambat juga (korupsi waktu). Sehingga memberi contoh/teladan kepada bawahan melalui sikap diri sendiri, adalah kepemimpinan organisasi [18]. Menurut penelitian sebelumnya oleh [7] bahwa gaya kepemimpinan merupakan faktor moderating antara kompetensi dan kecenderungan terjadinya kecurangan di sektor publik. Penelitian ini berfokus pada gaya kepemimpinan transaksional. Konsisten dengan hasil [20] dan dengan [21], kami menemukan bahwa gaya kepemimpinan dalam mengelola keuangan desa secara signifikan mempengaruhi tugas yang mereka emban, lebih khusus efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa yang dikelola berbanding lurus dengan gaya kepemimpinan kepala desa, sehingga pengelolaan uang desa yang lebih bertanggung jawab dihasilkan dari kinerja pegawai yang lebih tinggi.

Namun menurut penelitian [6] yang juga sejalan dengan [22] menyatakan bahwa kecurangan tidak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasan. Walaupun seorang pemimpin responsive dan perhatian tidak berpengaruh terhadap perilaku curang.

**H3 : Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa.**

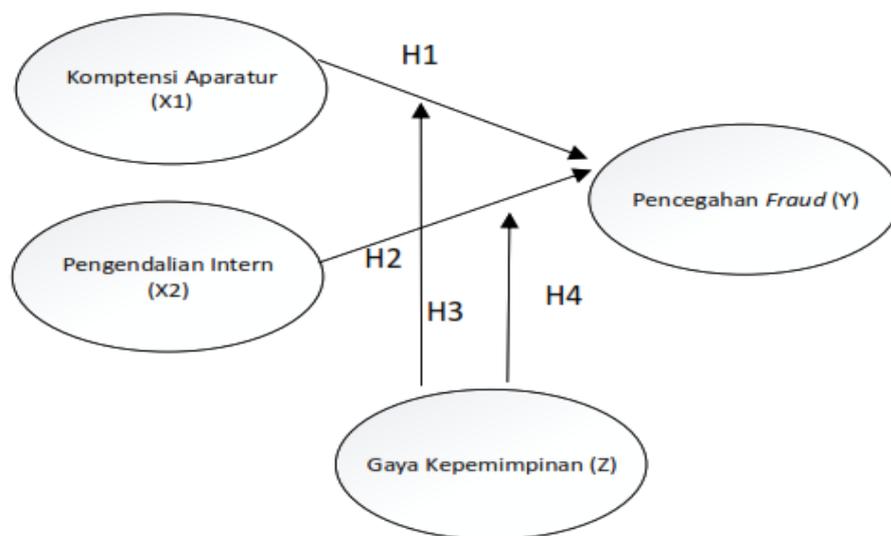
### **D. Gaya Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh antara Pengendalian Intern terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa**

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sedikit banyak mempengaruhi kualitas dari sebuah sistem pengendalian intern suatu organisasi/perusahaan. Setiap kepala desa adalah pemimpin, mereka memiliki pilihan dalam menjalankan kepemimpinannya yang telah dituangkan dalam RPJMDes. Sehingga Kepala Desa dapat mewujudkan tujuannya dengan gaya kepemimpinan yang ia pilih. Kepemimpinan transformational adalah salah satu gaya kepemimpinan yang dapat membawa iklim kerja lebih semangat serta dapat lebih memotivasi pekerja di bawahnya. Studi oleh [23] menunjukkan bahwa manajemen keuangan perusahaan akan lebih bertanggung jawab jika pemimpinnya lebih baik dalam membangun sistem pengendalian internal.

Sementara itu, penelitian terdahulu [14] menemukan bahwa persepsi pejabat tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa tidak konsisten. Di sektor publik, ASN dapat melakukan kecurangan terlepas dari apakah kepala dinas mencontohkan kepemimpinan yang baik atau buruk. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa ASN tidak akan curang. Studi [22] tidak menemukan hubungan antara gaya kepemimpinan dan ketidakjujuran, sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan *fraud* bila terjadi kekosongan pemimpin.

**H4 : Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh antara pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan ulasan tersebut, karena masih terdapat inkonsistensi teori maka peneliti menjabarkan hipotesis berupa kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel penguatan kompetensi aparatur desa dan penguatan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan desa dengan variabel gaya kepemimpinan sebagai pemoderasi.



Gambar 2 Kerangka konseptual

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei kuesioner, dengan sumber data primer. Populasi penelitian ini adalah 322 desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa/staf desa, dengan total keseluruhan 966. Jumlah sampel penelitian ini 86 responden, diambil desa yang mewakili masing-masing 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan metode purposive sampling menurut kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti yakni sebagai berikut :

- perangkat desa usia  $\geq 27$  tahun dan  $\leq 52$  tahun;
- perangkat desa yang mengelola keuangan desa (Kades/sekdes/bendahara desa);
- perangkat desa yang mengelola keuangan desa secara langsung minimal 2 tahun terakhir. Peneliti memilih 2 tahun terakhir, hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 terkait pembayaran non tunai di desa.

Tabel 1 Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator	Sumber Refrensi
1	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman, tingkat pendidikan, dan latar belakang pendidikan;</li> <li>Pemahaman terhadap peraturan;</li> <li>Pemahaman terhadap cara kerja, prosedur serta proses kerja pada instansi, dan kemauan untuk melakukan pengembangan diri;</li> <li>Pemahaman dan implementasi transparansi, akuntabilitas dan integritas;</li> <li>Manjalankan etika dan kode etik;</li> <li>Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi;</li> <li>Pemahaman wewenang atas keahliannya.</li> </ol>	[24]
2	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan pengendalian/pembagian wewenang</li> <li>Penilaian risiko</li> <li>Kegiatan Pengendalian</li> <li>Informasi dan Komunikasi</li> </ol>	PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam [14], Perbup Sidoarjo No. 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Variabel	Indikator	Sumber Refrensi
3	Gaya Kepemimpinan (Z)	1. Posisi kekuatan, delegasi tugas 2. Relasi pimpinan dengan bawahan 3. Etika pemimpin 4. Struktur tugas	Palupi (2018) dalam [14]
4.	Pencegahan Kecurangan (fraud) (Y)	1. Penyalahgunaan wewenang 2. Penyalahgunaan keuangan 3. Korupsi	Oktavia (2018) dalam [14]

Validitas dan reliabilitas instrumen diperiksa terlebih dahulu, sebelum hipotesis diuji. Kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang peningkatan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern, dan aplikasi khusus yang disebut analisis regresi moderat (MRA) digunakan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan pada kedua variabel (kompetensi aparatur dan pengendalian intern) dalam rangka pencegahan kecurangan di pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, digunakan uji interaksi regresi linier berganda ketika persamaan regresi memiliki unsur interaksi (perkalian dua atau lebih independen) [25].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengujian Frekuensi Data Primer

##### 1. Uji Distribusi Frekuensi Responden

Pada uji distribusi frekuensi responden ini peneliti akan menguraikan hasil kuesioner yang telah diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara Kompetensi Aparatur Desa, Pengendalian Intern terhadap Pencegahan Fraud dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel pemoderasi atas Pengelolaan Keuangan Desa dengan responden/sampel sebanyak 104 orang perangkat desa. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Adapun data yang peneliti peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Deskripsi Profil Responden**

No.	Keterangan	Frekuensi	Presentase
1.	Jenis Kelamin		
a.	Laki-laki	45	43%
b.	Perempuan	59	57%
	<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
2.	Usia		
a.	< 27 tahun	5	5%
b.	27 – 52 tahun	96	92%
c.	> 52 tahun	3	3%
	<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
3.	Pendidikan Terakhir		
a.	SMA/SMK	37	36%
b.	Diploma 1/2/3	8	8%
c.	S1	59	57%
	<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
4.	Lama Jabatan		
a.	< 1 tahun	2	2%
b.	1 s.d 2 tahun	5	5%
c.	> 2 tahun	97	93%
	<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
5.	Terdapat kasus pengaduan dalam kurun 3 tahun terakhir		
a.	Iya	12	12%
b.	Tidak	92	88%

No.	Keterangan	Frekuensi	Presentase
	Jumlah	104	100%

Sumber : Data Kuesioner (diolah)

Berdasarkan tabel 2 pada klasifikasi jenis kelamin, 104 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 43% sedangkan perempuan sebesar 57%. Pada klasifikasi usia, responden dalam penelitian ini paling banyak berusia antara 27-52 tahun dengan persentase sebesar 92% sedangkan responden berusia <27 tahun sebesar 5%, dan responden >52 tahun sebesar 3%. Pada klasifikasi pendidikan terakhir, responden dalam penelitian ini paling banyak berada pada jenjang pendidikan S1 dengan persentase sebesar 57% sedangkan paling sedikit jenjang pendidikan D1/2/3 dengan persentase sebesar 8%, dan sisanya sebesar 36% responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK. Pada klasifikasi lama menjabat, responden dalam penelitian ini paling banyak >2 tahun dengan persentase sebesar 93% sedangkan responden dengan pengalaman menjabat <1 tahun sebesar 2%, dan responden dengan pengalaman menjabat 1 s.d 2 tahun sebesar 5%. Dari 104 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini yang memiliki riwayat terdapat kasus pengaduan dalam kurun 3 tahun terakhir di desanya dengan persentase sebesar 12% menyatakan iya, sedangkan sisanya sebesar 88% menyatakan tidak memiliki riwayat terdapat kasus pengaduan dalam kurun 3 tahun terakhir di desanya.

## 2. Uji Distribusi Frekuensi Jawaban

Pada analisis deskriptif data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada responden akan dimasukkan dalam tabel kriteria interpretasi skor, tabel frekuensi dan tabel kategorisasi yang diberi skor atau bobot nilai pada tiap alternatif jawaban yang menjadi acuan dalam penelitian. Berdasarkan nilai rata-rata total skor masing-masing variabel akan diketahui bahwa variabel tersebut masuk dalam kategori tertentu.

Tabel 3 Dasar Interpretasi Skor Indikator Variabel Penelitian

No	Nilai Skor Rata-Rata Jawaban	Interprestasi
1	1 – 1,8	Jelek / Rendah
2	>1,8 – 2,6	Kurang
3	>2,6 – 3,4	Cukup
4	>3,4 – 4,2	Tinggi
5	>4,2 – 5,0	Sangat baik / Sangat Tinggi

Sumber : Sujana (2006:125) dalam [26]

Tabel 4 Hasil Distribusi Frekuensi Item Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Item	Skor Jawaban										Nilai rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0	0	0	15	17,4	29	33,7	42	48,8	4,31
X1.2	0	0	0	0	9	10,5	45	52,3	32	37,2	4,27
X1.3	0	0	0	0	2	2,3	35	40,7	49	57,0	4,55
X1.4	0	0	0	0	1	1,2	27	31,4	58	67,4	4,66
X1.5	0	0	0	0	0	0	20	23,3	66	76,7	4,77
X1.6	0	0	0	0	2	2,3	24	27,9	60	69,8	4,67
X1.7	0	0	0	0	5	5,8	36	41,9	45	52,3	4,47
<b>Rata-rata Total Skor</b>											<b>4,53</b>

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan nilai rata-rata total skor variabel Kompetensi Aparatur Desa pada tabel 4 diketahui sebesar 4,53 yang berarti bahwa secara keseluruhan Aparatur Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki kompetensi yang masuk dalam kategori **sangat baik**.

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Item Variabel Pengendalian Intern (X2)

Item	Skor Jawaban										Nilai rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0	0	0	8	9,3	28	32,6	50	58,1	4,49
X2.2	0	0	0	0	9	10,5	27	31,4	50	58,1	4,48
X2.3	0	0	0	0	3	3,5	27	31,4	56	65,1	4,62
X2.4	0	0	0	0	1	1,2	7	8,1	78	90,7	4,90
X2.5	0	0	1	1,2	9	10,5	25	29,1	51	59,3	4,47

X2.6	0	0	0	0	1	1,2	13	15,1	72	83,7	4,83
X2.7	0	0	1	1,2	5	5,8	23	26,7	57	66,3	4,58
<b>Rata-rata Total Skor</b>											<b>4,62</b>

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan nilai rata-rata total skor variabel Pengendalian Intern pada tabel 5 diketahui sebesar **4,62** yang berarti bahwa secara keseluruhan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas yang masuk dalam kategori **sangat baik**.

**Tabel 6** Distribusi Frekuensi Item Variabel Pencegahan Fraud (Y)

Item	Skor Jawaban										Nilai rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1.1	0	0	0	0	1	1,2	4	4,7	81	94,2	4,93
Y1.2	0	0	0	0	5	5,8	22	25,6	59	68,6	4,63
Y1.3	0	0	0	0	3	3,5	9	10,5	74	86,0	4,83
Y1.4	0	0	0	0	2	2,3	18	20,9	66	76,7	4,74
Y1.5	0	0	0	0	1	1,2	22	25,6	63	73,3	4,72
<b>Rata-rata Total Skor</b>											<b>4,77</b>

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan nilai rata-rata total skor variabel Pengendalian Intern pada tabel 6 diketahui sebesar 4,77 yang berarti bahwa secara keseluruhan Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas yang masuk dalam kategori **sangat baik**.

**Tabel 7** Distribusi Frekuensi Item Variabel Gaya Kepemimpinan (Z)

Item	Skor Jawaban										Nilai rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Z1.1	0	0	1	1,4	8	10,8	34	45,9	31	41,9	4,34
Z1.2	0	0	5	6,8	8	10,8	35	47,3	26	35,1	4,14
Z1.3	0	0	1	1,4	8	10,8	24	32,4	41	55,4	4,45
Z1.4	0	0	2	2,7	13	17,6	30	40,5	29	39,2	4,20
Z1.5	0	0	2	2,7	3	4,1	27	36,5	42	56,8	4,52
<b>Rata-rata Total Skor</b>											<b>4,33</b>

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan nilai rata-rata total skor variabel Gaya Kepemimpinan diketahui sebesar 4,33 yang berarti bahwa secara keseluruhan Gaya Kepemimpinan atas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sidoarjo memiliki kualitas yang masuk dalam kategori **sangat baik**.

## Pengujian Kualitas Data

### a. Uji Validitas

**Tabel 8.** Uji Validitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	214,1628	289,738	,363	,902
Y1.2	214,4651	283,546	,480	,900
Y1.3	214,2674	286,716	,418	,901
Y1.4	214,3488	284,018	,561	,899
Y1.5	214,3721	282,119	,698	,898
Pencegahan Fraud	195,2442	254,163	,630	,895
X1.1	214,7791	283,445	,374	,900
X1.2	214,8256	282,569	,490	,899
X1.3	214,5465	282,651	,576	,899
X1.4	214,4302	283,236	,597	,899
X1.5	214,3256	286,881	,449	,901
X1.6	214,4186	283,329	,568	,899
X1.7	214,6279	279,860	,654	,898

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kompetensi Aparatur Desa	187,3953	226,312	,706	,899
X2.1	214,6047	280,407	,570	,898
X2.2	214,6163	277,345	,692	,897
X2.3	214,4767	278,582	,787	,897
X2.4	214,1977	286,772	,569	,900
X2.5	214,6279	277,107	,653	,897
X2.6	214,2674	284,128	,665	,899
X2.7	214,5116	279,665	,609	,898
Pengendalian Intern	186,7442	209,369	,868	,893
Z1.1	214,7558	278,069	,662	,897
Z1.2	214,9535	276,045	,578	,897
Z1.3	214,6395	277,974	,617	,897
Z1.4	214,8953	276,683	,601	,897
Z1.5	214,5698	278,813	,706	,897
Gaya Kepemimpinan	197,4419	220,273	,695	,903

Sumber : Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Hasil pengujian validitas disajikan bahwa pada hasil pengujian validitas semua item pernyataan kuesioner variabel (X), variabel (Y) dan variabel (Z) mempunyai nilai koefisien korelasi diatas 0,30 (>0,30), akibatnya semuanya dapat dinyatakan valid berdasarkan variabel (X), variabel (Y) dan variabel (Z).

## b. Uji Reabilitas

Tabel 9. Uji Reabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	214,1628	289,738	,363	,902
Y1.2	214,4651	283,546	,480	,900
Y1.3	214,2674	286,716	,418	,901
Y1.4	214,3488	284,018	,561	,899
Y1.5	214,3721	282,119	,698	,898
Pencegahan Fraud	195,2442	254,163	,630	,895
X1.1	214,7791	283,445	,374	,900
X1.2	214,8256	282,569	,490	,899
X1.3	214,5465	282,651	,576	,899
X1.4	214,4302	283,236	,597	,899
X1.5	214,3256	286,881	,449	,901
X1.6	214,4186	283,329	,568	,899
X1.7	214,6279	279,860	,654	,898
Kompetensi Aparatur Desa	187,3953	226,312	,706	,899
X2.1	214,6047	280,407	,570	,898
X2.2	214,6163	277,345	,692	,897
X2.3	214,4767	278,582	,787	,897
X2.4	214,1977	286,772	,569	,900
X2.5	214,6279	277,107	,653	,897
X2.6	214,2674	284,128	,665	,899
X2.7	214,5116	279,665	,609	,898
Pengendalian Intern	186,7442	209,369	,868	,893
Z1.1	214,7558	278,069	,662	,897
Z1.2	214,9535	276,045	,578	,897

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Z1.3	214,6395	277,974	,617	,897
Z1.4	214,8953	276,683	,601	,897
Z1.5	214,5698	278,813	,706	,897
Gaya Kepemimpinan	197,4419	220,273	,695	,903

**Sumber :** Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji reabilitas, maka penelitian ini atas pernyataan instrument variabel independen berupa Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Pengendalian Intern (X2), serta variabel dependen berupa Pencegahan Fraud (Y) yang mana seluruh variabel bernilai > 0,70 yang artinya seluruh variabel dinyatakan sudah reliabel.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 10.** Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,906	1,894		6,286	,000
	Kompetensi Aparatur Desa	-,012	,073	-,019	-,164	,870
	Pengendalian Intern	,381	,068	,634	5,605	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

**Sumber :** Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data sesuai tabel 4 dapat dijelaskan dengan persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 11,906 - 0,012X_1 + 0,381X_2 + e$$

Dimana :

Y : Pencegahan *Fraud*

X1 : Kompetensi Aparatur Desa

b : Konstanta

X2 : Pengendalian Intern

e : Standar error

Dari persamaan regresi linier berganda yang terbentuk dapat dijelaskan mengenai hubungan antar variabel independen dan dependen sebagai berikut :

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta sebesar 11,906, yang menjelaskan bahwa jika variabel bebas yakni Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Pengendalian Intern (X2) masing-masing bernilai 0 atau konstan, maka nilai dari variabel dependen berupa Pencegahan Fraud (Y) memiliki hasil tetap senilai 11,906.

2. Kompetensi Aparatur Desa (X1)

Koefisien variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) bernilai negatif 0,012 sehingga mengartikan bahwa variabel tersebut mempunyai korelasi berbanding terbalik dengan variabel Pencegahan Fraud (Y). Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) mengalami peningkatan satu satuan, membuat variabel Pencegahan Fraud (Y) akan mengalami penurunan nilai sebesar 0,012 satuan dengan perkiraan variabel bebas lainnya konstan.

3. Pengendalian Intern (X2)

Koefisien variabel Pengendalian Intern (X2) yang bernilai positif 0,381 sehingga mengartikan bahwa variabel tersebut mempunyai korelasi berbanding lurus dengan variabel Pencegahan Fraud (Y). Apabila variabel pengendalian intern (X2) mengalami kenaikan nilai satu satuan, sehingga variabel variabel Pencegahan Fraud (Y) terjadi peningkatan sebesar 0,381 satuan.

### Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 11.** Uji R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,622 <sup>a</sup>	,387	,372	1,426

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Desa

**Sumber :** Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Dari output diatas, didapatkan nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,367 yang artinya pengaruh

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebesar **38,7%**. Hal ini berarti variabel independen berupa Kompetensi Aparatur Desa (X1) dan Pengendalian Intern (X2) mempengaruhi Pencegahan Fraud (Y) sebesar 38,7%. Sedangkan sisanya 61,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**b. Uji t (uji parsial)**

**Tabel 12.** Hasil Uji Parsial (Uji t) melalui Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,906	1,894		6,286	,000
	Kompetensi Aparatur Desa	-,012	,073	-,019	-,164	,870
	Pengendalian Intern	,381	,068	,634	5,605	,00000027

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

**Sumber :** Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui analisis regresi linier berganda pada tabel 12 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Hipotesis pertama**

Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Keuangan Desa memperlihatkan nilai signifikansi sebesar **0,870 > 0,05** dan didapat dari nilai t hitung -0,164 dan t tabel 1,666. Sebab nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 0,164 < 1,66 dan tingkat signifikan 0,870 > 0,05 sehingga H1 yang menyatakan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) secara parsial dapat mempengaruhi Pencegahan Fraud (Y) ditolak.

**2. Hipotesis kedua**

Pengendalian intern berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar **0,00000027 < 0,05** serta diperoleh nilai t hitung 5,605 dan nilai t tabel 1,666. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 5,605 > 1,666 dan tingkat signifikan 0,00000027 < 0,05 sehingga H2 menyebutkan bahwa variabel pengendalian intern (X2) secara parsial dapat mempengaruhi Pencegahan Fraud (Y) diterima.

**c. MRA (analisis regresi dengan variabel moderating)**

**Tabel 13.** Hasil Uji MRA

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,632	12,195		1,200	,234
	Kompetensi Aparatur Desa	,963	,597	1,496	1,613	,111
	Pengendalian Intern	-,692	,444	-1,151	-1,557	,123
	Gaya Kepemimpinan	-,211	,589	-,363	-,359	,721
	Kompetensi Aparatur Desa dengan pemoderasi Gaya Kepemimpinan	-,047	,027	-3,477	-1,701	,093
	Pengendalian Intern dengan pemoderasi Gaya Kepemimpinan	,054	,022	4,225	2,465	,016

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

**Sumber :** Hasil Output SPSS versi 26 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan moderated regression analysis (MRA) tabel 13 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Hipotesis ketiga**

Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud atas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan tabel 13 di atas dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  dari variabel interaksi antara kompetensi aparatur desa dengan gaya kepemimpinan diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,093 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,093 > 0,05$ ) sehingga hipotesis ketiga ditolak. Jadi, hal ini berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa.

**2. Hipotesis keempat**

Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud atas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan tabel 7 di atas dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  dari variabel interaksi antara pengendalian intern dengan gaya kepemimpinan diperoleh tingkat

signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,016 < 0,05$ ) sehingga hipotesis keempat diterima. Jadi, hal ini berarti bahwa variabel gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa.

#### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi yaitu nilai signifikansi dari variabel kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) adalah  $0,870 > 0,05$ . Hal ini berarti  $H_1$  yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa tidak didukung. Artinya semakin rendah atau tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dikerjakan oleh [5], [27] dan [14] yang menegaskan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dikerjakan oleh [6] serta penelitian oleh [12] dan [13] yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini karena mayoritas perangkat desanya memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang disandanginya, sehingga fungsi aparatur tidak banyak berdampak untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

##### 2. Pengendalian Intern Berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi yaitu nilai signifikansi dari variabel pengendalian intern ( $X_2$ ) adalah  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_2$  yaitu pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikerjakan oleh [5], [6], [12] dan [27] yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Bahwa atas tindakan curang (fraud) dalam mengelola keuangan di suatu pemerintahan bisa ditangkal dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Efektifnya pengendalian intern berdampak pada meningkatnya kualitas pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya melalui mekanisme non tunai.

##### 3. Gaya Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh antara Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* atas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi pada tabel 7 di atas dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  dari variabel interaksi antara kompetensi aparatur desa dengan gaya kepemimpinan diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0,093 > 0,05$  sehingga variabel gaya kepemimpinan tidak memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sependapat dengan penelitian [6] yang juga sejalan dengan [22] menyatakan bahwa kecurangan tidak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasan. Hasil penelitian lain [28] mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan, usia, bukanlah faktor, melainkan cara penanganan krisis dan pilihan yang dibuat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seorang kepala desa. Di sisi lain, legitimasi kepala desa saat ini dipertanyakan ketika pilihan dibuat berbeda atau ketika hasil musyawarah dilaksanakan berbeda. Penelitian [22] dan [29] menemukan bahwa gaya manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan karyawan untuk berbuat curang. Walaupun seorang pemimpin responsive dan perhatian tidak berpengaruh terhadap perilaku curang, tidak ada perbedaan dalam perilaku curang apakah pemimpin itu perhatian dan penyayang atau tidak. Kepemimpinan memang penting, tetapi kolaborasi antara atasan dan karyawanlah yang benar-benar membuat perbedaan dalam sebuah organisasi.

##### 4. Gaya Kepemimpinan Memoderasi Pengaruh antara Pengendalian Intern terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diperoleh informasi pada tabel 7 di atas dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  dari variabel interaksi antara pengendalian intern dengan gaya kepemimpinan diperoleh tingkat signifikansi sebesar  $0,016 < 0,05$  sehingga variabel gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian [23] menunjukkan bahwa manajemen keuangan perusahaan akan lebih bertanggung jawab jika pemimpinnya lebih baik dalam membangun sistem pengendalian internal. Karena gaya kepemimpinan seorang pemimpin sedikit banyak mempengaruhi kualitas dari sebuah sistem pengendalian intern suatu organisasi.

#### IV. SIMPULAN

Dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dijelaskan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Aparatur Desa tidak memiliki pengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, karena mayoritas perangkat desanya yang mengelola keuangan desa memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang disandanginya.
2. Pengendalian Intern memiliki pengaruh Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa,

- semakin baik sistem pengendalian intern sebuah desa terhadap pengelolaan keuangannya akan semakin efektif untuk pencegahan fraud.
3. Gaya kepemimpinan tidak memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa, karena mayoritas kepala desa sebagai pengelola keuangan tidak memiliki tujuan yang jelas dalam mengelola keuangan desa hanya berdasarkan arahan pada salah satu perangkat yang dominan.
  4. Gaya kepemimpinan memoderasi pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa yang memiliki gaya kepemimpinan baik dan tepat akan menetapkan kebijakan yang tepat agar pengendalian intern di wilayahnya menjadi efektif untuk pencegahan fraud.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan yang dihadapi peneliti diantaranya :

1. Peneliti hanya melakukan sampling desa dari masing-masing 18 Kecamatan seKabupaten Sidoarjo, karena terbatas tenaga, waktu dan biaya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel "Kompetensi Aparatur Desa, Pengendalian Intern serta Gaya Kepemimpinan". Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan lebih besar pengaruhnya terhadap Pencegahan Fraud atas Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **Saran**

1. Saran untuk penelitian selanjutnya :
  - a. Untuk studi selanjutnya diharapkan dapat mengambil seluruh desa atau 322 desa se-Kabupaten Sidoarjo menjadi obyek penelitian.
  - b. Agar pada peneliti selanjutnya memberikan tambahan pada variabel bebas lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, serta dapat memberikan tambahan variabel moderasi atau variabel mediasi.
2. Saran Bagi Desa se-Kabupaten Sidoarjo :
 

Diharapkan lebih meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa dengan sungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan teknis/pelatihan terkait, agar pelatihan yang selama ini dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan output yang diharapkan. Serta atas Pengendalian Intern dapat ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi lebih baik lagi pada seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo agar Pencegahan Fraud dapat maksimal. Serta kedepannya agar seluruh Kepala Desa lebih bijak dan tegas dalam memimpin desanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saran Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo :
 

Selaku dinas pembina Aparatur Desa agar meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa dengan menganggarkan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan, yang diberikan pre-tes dan post-tes supaya dapat mengukur keberhasilan kegiatan peningkatan Aparatur Desa. Serta dapat mengkaji ulang Peraturan Bupati mengenai penjarangan perangkat desa, karena dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak menyebutkan apabila mengisi jabatan Kaur Keuangan harus memiliki ketrampilan/kemampuan tentang keuangan (seperti SMK Akuntansi, atau Sarjana Akuntansi) yang ada hanya syarat khusus untuk calon Kepala Seksi Kesejahteraan. Supaya para pengelola keuangan desa lebih memahami tupoksinya dan dapat menghindari perbuatan *fraud*.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, perangkat desa Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia menjadi responden, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia diwawancarai guna mendukung hasil penelitian ini.

#### **REFRENSI**

- [1] Indonesia Corruption Watch, "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," Indonesia, 2022. [Online]. Available: <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>
- [2] R. Zakariya, "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi," *INTEGRITAS J. Antikorupsi*, vol. 6, no. 2, pp. 263–282, 2020, doi: 10.32697/integritas.v6i2.670.
- [3] T. M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*, Edisi 2. Salemba Empat, 2010.
- [4] I. A. A. Oktaviani, N. T. Herawati, and A. T. Atmadja, "Pengaruh praktik akuntabilitas, conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng," *E-journal Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 8, no. 2, pp. 1–10, 2017, [Online]. Available: [https://web.archive.org/web/20180415152842id\\_/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13260/8342](https://web.archive.org/web/20180415152842id_/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13260/8342)
- [5] A. Z. Putri and F. D. Prasiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Akmenika J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 18, no. 2, pp. 1–12, 2021.
- [6] Romadaniati, T. Taufik, and A. Nasir, "The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control

- System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District,” *J. Ilm. Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 227–237, 2020, [Online]. Available: <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- [7] F. L. Wijayanto, “Komitmen Organisasi, Kapabilitas, Gaya Kepemimpinan Dan Kecenderungan Fraud Di Sektor Pemerintahan (Persepsi Aparatur Sipil Negara Di Kota Salatiga),” *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 9, no. 1, pp. 120–130, 2020.
- [8] E. Rahmawati, S. Sarwani, R. Rasidah, and M. Yulastina, “Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar,” *J. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 129–152, 2020, doi: 10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152.
- [9] D. Priantara, *Fraud Auditing & Investigation*. Mitra Wacana Media, 2013.
- [10] L. S. I. D. Jayanti and K. A. Suardana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 29, no. 3, pp. 1117–1131, 2019, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p16>.
- [11] M. C. Jensen and W. H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure,” *J. financ. econ.*, vol. 3, no. 3, pp. 305–360, 1976, [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X7690026X>
- [12] P. S. P. Laksmi and I Ketut Sujana, “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 26, no. 3, pp. 2155–2182, 2019, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p18>.
- [13] S. Biduri, H. Fitriyah, and P. Febriana, “Pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa,” *Own. Ris. dan J. Akunt.*, vol. 6, no. 4, pp. 4021–4036, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i4.1085.
- [14] W. Agustina, “Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu),” Universitas Jember, 2019. [Online]. Available: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98407>
- [15] D. K. Wardani and I. Andriyani, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten,” *J. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 88–98, 2017, doi: 10.24964/ja.v5i2.270.
- [16] K. Wonar, S. Falah, and B. J. C. Pangayow, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Akuntansi, Audit. dan Aset*, vol. 1, no. 2, pp. 63–89, 2018, doi: 10.52062/jurnal\_aaa.v1i2.9.
- [17] K. A. K. Saputra, P. D. Pradnyanitasari, N. M. I. Priliandani, and I. G. B. N. P. Putra, “Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *J. Krisna Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 168–176, 2019, doi: <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>.
- [18] P. F. K. Dewi, G. A. Yuniarta, and M. A. Wahyuni, “Pengaruh Moralitas, Integritas, Komitmen Organisasi, Dan Pengendalian Internal Kas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Studi Pada Desa di Kabupaten Buleleng),” *J. Sarj. Akunt.*, vol. 8, no. 2, pp. 35–50, 2017, [Online]. Available: [https://web.archive.org/web/20180415155756id\\_/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13310/8372](https://web.archive.org/web/20180415155756id_/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/13310/8372)
- [19] A. Darmawan and M. A. Putri, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi Melalui,” *Ilmu Akunt.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–18, 2017, doi: 10.15408/akt.v10i1.6109.
- [20] I. B. Pramayoga and I. W. Ramantha, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. 1, pp. 226–237, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/54326/33188>
- [21] N. K. A. J. P. Dewi and Gayatri, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” vol. 26, no. 2, pp. 1269–1298, 2019, doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>.
- [22] A. Rahmantari and N. Novianti, “Pengaruh Penegakan Hukum, Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Keadilan Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo),” *Skripsi Univ. Brawijaya*, pp. 1–15, 2017, [Online]. Available: <https://current.ejournal.unri.ac.id>
- [23] D. F. Puspa and R. A. Prasetyo, “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Media Ris. Akuntansi, Audit. Inf.*, vol. 20, no. 2, pp. 281–298, 2020, doi: 10.25105/mraai.v20i2.7894.
- [24] P. I. Purbasari, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember,” Universitas

- Pendidikan Ganesha, 2020. [Online]. Available: <https://repo.undiksha.ac.id/2330/>
- [25] E. W. Ningdiyah, *Pelatihan Olah Data SPSS*. 2022.
- [26] C. E. Triningsih and A. Nugrohadhi, "Al-M a ' mun : Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi Evaluasi Pemanfaatan Koleksi E-Book dan E-Journal terhadap Kinerja Studi Mahasiswa UAJY Selama Masa Pandemi Covid ( 2020-2021 )," vol. 3, no. 2, pp. 72–87, 2022.
- [27] V. V. Adhivinna, M. Selawati, and M. S. Umam, "Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa," *J. Apl. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 63–74, 2022, doi: 10.29303/jaa.v6i2.138.
- [28] V. Soukotta and I. Utami, "Apakah Gaya Kepemimpinan Mendukung Potensi Pengungkapan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa ?," *J. Online Insa. Akuntan*, vol. 4, no. 2, pp. 223–238, 2019.
- [29] M. H. D. Indrapraja, R. Agusti, and N. F. Mela, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara," *J. Kaji. Akunt. dan Bisnis Terkini*, vol. 2, no. 2, pp. 166–183, 2021, [Online]. Available: <https://current.ejournal.unri.ac.id>

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*